

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus*.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar*

*Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.*

## **Buku**

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Admosudirjo, S. Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Agustina, Rosa, et al. *Hukum Perikatan*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- . *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Amiruddin. *Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Asmara, Galang, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overhedsdaad (OOD) dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 5th ed. St. Paul, MN: West Publishing Co., 1979.
- Efendi, A'an, and Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika Cahaya Prima Sentosa, 2017.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

- Hadjon, Philipus M. *Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling)*. Surabaya: Djumali, 1985.
- Hayek, F. A. *The Constitution of Liberty: The Definitive Edition*. Edited by Ronald Hamowy. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Marbun, S. F., and Moh. Mahfud MD. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. 5th ed. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019.
- Muchsan. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Partanto, Pius A., and M. Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmu Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, and Marthalena Pohan. *Onrechtmatige Daad*. Surabaya: Djumali, 1979.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. 2nd ed. Bandung: Alumni, 1978.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Bahasa: Belanda-Indonesia-Inggris*. Edisi lengkap. Semarang: CV Aneka Ilmu, 2008.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- . *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Sadjijono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011.

- . *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008.
- Schrijvers, P. M. B., and H. C. M. Smeets. *Staats-en Bestuurecht*. Groningen: Wolters-Noordhoff, 2003.
- Seerden, R., and F. Stroink. “Administrative Law in the Netherlands.” In *Administrative Law of the European Union, Its Member States & the United States: Comparative Analysis*, edited by R. Seerden and F. Stroink. Antwerpen-Groningen: Intersentia Uitgevers, 2002.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 2010.
- Sujata, Antonius. *Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional, 2005.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soehino. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Satriawan, Dewa Gede, et al. *Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Stevens, Irving. *Constitutional & Administrative Law*. London: Pitman Publishing, 1996.
- Termorshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Tim Pengajar Pengantar Hukum Indonesia. *Materi Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Riawan Tjandra, W. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Utrecht, E., and Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1985.
- Wheare, K. C. *Maladministration and Its Remedies*. 1st ed. London: Steven and Son, 1973.

#### **Artikel Jurnal**

- Antoro, B. Hengky Widhi, dan Rosita Miladmahesi. "Dinamika Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dari Undang-Undang Sampai Dengan Peraturan Mahkamah Agung." *Prosiding Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (December 31, 2023): 67–94. <https://doi.org/10.55292/qjaezd19>.
- Barokah, Muhammad Raziv, dan Anna Erliyana "Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3290>.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (August 2018): 265–86.
- Edyanti, Yusrin, and Anna Erliyana. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2 (2022), Article 14. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/14>.
- Eric, Wening Anggraita. "Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)." *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, February 5, 2021.
- Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. "Problematisasi Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)." *Widya Pranata Hukum* 2, no. 1 (2020): 19-39. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.79>.
- Gurusinga, Iren Margaretha, Rodiatun Adawiyah, dan Muhammad Arif Prasetyo. "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Penerbitan Kebijakan Perdagangan Yang Berdampak Pada Kerugian Investasi Korporasi ( Studi Putusan No. 3091 K/Pdt/2025)." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, June 2026.
- Hadjon, Philipus M. "Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang No. 30 Th. 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 51-64. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.51-64>.

- Juliani, Henny. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 54-70. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.54-70>.
- Kotze, L. J. "The Application of Just Administrative Action in the South African Environmental Governance Sphere: An Analysis of Some Contemporary Thoughts dan Recent Jurisprudence." *Potchefstroom Electronic Law Journal* 7, no. 2 (2004): 57-94. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2004/v7i2a2850>.
- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule of Law and Not Power State." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 3-3, May 12, 2017. <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.421-446>.
- Pasaribu, David, Irene Cristna Silalahi, dan Selviana Purba. "Cumulation of Lawsuits between Administrative Decisions and Factual Actions in Administrative Court Decisions." *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN* 14, no. 2 (July 31, 2025): 459-94. <https://doi.org/10.25216/jhp.14.2.2025.459-494>.
- Salam, Syukron. "Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa." *Nurani Hukum* 1, no. 1 (December 2018): 33-44.
- Sitanggang, Riko Wibawa. "Kewenangan Mengadili Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Yang Bersifat Keperdataan." *Honeste Vivere* 35, no. 2 (July 21, 2025): 179-95. <https://doi.org/10.55809/hv.v35i2.459>.
- Susilo, Agus Budi. "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 291-308. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.291-308>.
- Watung, Maximus. "Onrechtmatige Overheidsdaad Dalam Praktek Peradilan Negara Hukum Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 415/Pdt.G/2015/PN.Mnd Tanggal 19 Mei 2016)." *Lex Et Societatis* 6, no. 1 (2018): 46-56. <https://doi.org/10.35796/les.v6i1.19171>.

## Hasil Penelitian

- Abdullah, Ujang. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa." Paper presented at Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Provinsi Lampung, July 13-14, 2005.

Djatmiati, Tatiek Sri. "Prinsip Izin Usaha di Indonesia." Disertasi Doktorat, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, 2004.

Huda, Khoirul. "Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Pemerintahan Dalam Maladministrasi." Disertasi Doktorat, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013.

Husendro. "Ombudsman: Reformasi Birokrasi Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia (Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)." Paper presented at Focus Group Discussion "Membedah UU Ombudsman Republik Indonesia Dalam Rangka Reformasi Birokrasi," Hotel Harris, Jakarta, December 19, 2008.

Muttaqin, Elfran Bima. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara." Disertasi doktorat, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2024.

Pratiwi, Cekli Setya, et al. *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Judicial Sector Support Programme (JSSP), 2014-2018.

Yulia, Rena, dan Duke Arie Widagdo. "Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi Dan Viktimologi." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 243-64. <https://doi.org/10.55292/jvs1v935>.

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.*

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. *Putusan Nomor 473/G/TF/2023/PTUN.JKT.*

Pengadilan Tinggi Jakarta. *Putusan Nomor 163/Pdt/2025/PT DKI.*

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 3091 K/Pdt/2025.*

### **Internet**

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng dan Bahan Bakunya Mulai 28 April 2022." April 22, 2022. <https://setkab.go.id/pemerintah-larang-ekspor-minyak-goreng-dan-bahan-bakunya-mulai-28-april-2022/>.

Ombudsman Republik Indonesia. "Ombudsman RI Berikan Tindakan Korektif kepada Pemerintah Soal Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng." Accessed May 21, 2026. <https://ombudsman.go.id/news/r/->

[ombudsman-ri-berikan-tindakan-korektif-kepada-pemerintah-soal-ketersediaan-dan-stabilisasi-harga-minyak-goreng.](#)

Pranoto, Edi. “Maladministrasi Akibat Hukum dan Penyelesaiannya.” Online paper, n.d. Accessed July 25, 2011. <http://edipranoto.blogspot.com/2011/02/maladministrasi-akibat-hukum-dan.html>.

### **Wawancara**

Muhammad Adiguna Bimasakti, “Wawancara Skripsi PMHP/OOD” interview oleh Ahmad Setiaji, 6 Juli, 2026.